

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkat ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 berfluktuasi. Persentase rumah tangga tahan pangan rata-rata mencapai 21,03 persen dan cenderung menurun, persentase rumah tangga rentan pangan relatif tetap, yaitu 35,64 persen, sedangkan rata-rata persentase rumah tangga kurang pangan 17,85 persen dan rawan pangan 25,48 persen dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Sebaran desa/kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3) di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 130 desa/kelurahan atau 51,79 persen dari total desa/kelurahan yang tersebar pada 16 kecamatan, sedangkan desa/kelurahan yang relatif tahan pangan (prioritas 4, prioritas 5 dan prioritas 6) berjumlah 121 desa/kelurahan atau 48,21 persen yang tersebar pada 17 kecamatan. Kecamatan Way Panji merupakan kecamatan paling tahan pangan.
3. Faktor penentu utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan adalah jumlah toko/warung, jumlah penduduk miskin, kondisi infrastruktur jalan, sarana kesehatan, jumlah penderita gizi buruk dan sarana pendidikan.

4. Strategi pembangunan ketahanan pangan yang akan direkomendasikan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :
- a. Aspek ekonomi
    - Membentuk lembaga pemerintah yang khusus menangani promosi dan kemudahan pelayanan investasi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.
    - Membentuk lembaga keuangan mikro pedesaan untuk memudahkan akses permodalan bagi petani dan nelayan.
    - Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar (bantuan pangan, pendidikan dan kesehatan).
    - Prioritas anggaran untuk sektor ketahanan pangan yang melekat pada dinas/instansi sesuai semangat otonomi daerah.
  - b. Aspek sosial budaya
    - Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan.
    - Menciptakan fasilitator daerah untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kelompok oleh setiap SKPD.
    - Meningkatkan peran swasta dan BUMN/BUMD melalui pengembangan CSR.
    - Meningkatkan peran dan pengabdian perguruan tinggi dalam penguatan kelembagaan masyarakat.
    - Optimalisasi peran kelembagaan perempuan (PKK, KWT, Posyandu dll) dalam penyuluhan pangan beragam, bergizi dan aman.
    - Penerapan aturan yang ketat terhadap jual beli dan alih fungsi lahan pertanian yang produktif dan subur.

c. Aspek pendidikan

- Pemberian muatan materi pangan, gizi dan jajanan sehat di sekolah.
- Pembinaan terhadap petani dan nelayan menghadapi perubahan iklim.
- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dan sistem promosi yang jelas (pengukuran kinerja, pemberian reward & punishment).
- Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya.

d. Aspek teknologi

- Inventarisasi lahan pertanian dan perikanan pada setiap kecamatan.
- Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pedesaan (pasar, jalan desa, irigasi, fasilitas air bersih, dll).
- Percepatan informasi iklim dan teknologi pertanian melalui pendampingan dan penyuluhan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan keluarga terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal, mengingat relatif tingginya persentase rumah tangga yang tergolong rentan pangan, kurang pangan dan rawan pangan. Peningkatan pengetahuan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan dengan melibatkan kelompok perempuan antara lain Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK), Kelompok Wanita Tani (KWT), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lain-lain, serta memberikan muatan materi

pangan, gizi serta jajanan sehat di sekolah-sekolah. Tambahan materi pelajaran tersebut disisipkan pada materi muatan lokal yang legalitasnya diatur melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Tujuannya adalah agar pengetahuan dasar tentang pangan, gizi berimbang serta jajanan sehat dan aman dikonsumsi dipahami oleh anak-anak sejak usia dini.

2. Pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar diprioritaskan pada 130 desa/kelurahan yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 1, 2 dan 3), dengan memperhatikan faktor-faktor penentu utama penyebab terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Desa/kelurahan yang menjadi prioritas sasaran pembangunan tersebar pada 16 kecamatan (nama desa/kelurahan terlampir). Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan yang paling tahan pangan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) anggota Dewan Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertimbangkan rumusan strategi yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan serta teknologi hasil analisis SWOT. Rumusan strategi pembangunan ketahanan pangan tersebut melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.